

Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga Dalam Membangun Desa Mandiri : Studi Kasus Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Della Rahmawati*, Isna Fitria Agustina

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit No.666 B, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

E-mail: isnaagustina@umsida.ac.id, *dellarahmawati3072@gmail.com

Article History:

Received	: 27/10/2025
Received in revised form	: 30/12/2025
Accepted	: 30/02/2026

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the Family Assistance Team (TPK) Program in realizing a self-reliant village in Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. The TPK Program is a strategy to accelerate stunting reduction implemented based on Presidential Regulation Number 72 of 2021 and refers to the Circular Letter of the Head of BKKBN Number 1053/BL 02/G3/2021 concerning the establishment of TPK at the village level. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, with informants selected using purposive sampling techniques. Data analysis was conducted through the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings were analyzed using George C. Edward III's policy implementation model, which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In terms of communication, information was delivered directly to the target groups through home visits without formal socialization at the village level. Regarding resources, the program was supported by operational facilities, financial support, and cadre training, although technical constraints were found in the Elsimil application-based reporting system and limited internet connectivity. In terms of disposition, cadres demonstrated enthusiasm, responsibility, and active coordination in carrying out assistance activities. Concerning bureaucratic structure, the program was supported by a Village Head Decree with a territorial-based division of tasks and an equitable distribution of beneficiaries. Overall, the implementation of the TPK Program in Desa Jambangan has been carried out in accordance with the established structure and mechanisms in supporting the acceleration of stunting reduction at the village level.*

Keywords: Implementation; Family Support Team; Independent Village; Stunting

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Program TPK merupakan strategi percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta mengacu pada Surat Kepala BKKBN Nomor 1053/BL 02/G3/2021 tentang pembentukan TPK di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan model implementasi

kebijakan menurut George C. Edward III yang mencakup empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada indikator komunikasi, penyampaian informasi dilakukan secara langsung melalui kunjungan rumah kepada sasaran tanpa sosialisasi formal di tingkat desa. Pada indikator sumber daya, program didukung oleh fasilitas operasional, dukungan finansial, serta pelatihan kader, meskipun masih terdapat kendala teknis pada sistem pelaporan berbasis aplikasi Elsimil dan keterbatasan jaringan internet. Pada indikator disposisi, kader menunjukkan sikap antusias, bertanggung jawab, serta aktif berkoordinasi dalam pelaksanaan pendampingan. Pada indikator struktur birokrasi, program didukung oleh Surat Keputusan Kepala Desa dengan pembagian tugas berbasis wilayah dan distribusi sasaran yang merata. Secara keseluruhan, implementasi Program TPK di Desa Jambangan telah berjalan sesuai struktur dan mekanisme yang ditetapkan dalam mendukung percepatan penurunan stunting ditingkat desa.

Kata kunci: Implementasi; Tim Pendamping Keluarga; Desa Mandiri; Stunting

PENDAHULUAN

Desa Mandiri adalah konsep pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan potensi lokal dan peningkatan kemampuan masyarakat. Desa yang mandiri tidak semata-mata bergantung pada bantuan pemerintah pusat maupun daerah, melainkan mampu mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya secara berkelanjutan (Suherman & Rohaeni, 2023). Salah satu program strategis yang dilaksanakan untuk mewujudkan desa mandiri adalah Program Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim ini terdiri dari tenaga profesional yang dibentuk dengan melibatkan bidan, kader TP PKK, serta kader KB. Tugas utama TPK adalah memberikan pendampingan berupa edukasi, rujukan, serta memfasilitasi akses terhadap program bantuan sosial bagi calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu nifas, anak berusia 0 hingga 59 bulan, dan keluarga yang berisiko mengalami stunting. Melalui pendampingan ini, keluarga diharapkan mampu mengenali faktor risiko stunting sejak dini. Komposisi tim dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, misalnya dengan bekerja sama dengan bidan dari desa atau kabupaten lain, atau melibatkan perawat maupun tenaga kesehatan profesional lainnya (Rahman et al., 2025).

Pemerintah telah membentuk tim pendamping keluarga dengan fokus pada keluarga berisiko stunting, sesuai dengan Surat Kepala BKKBN Nomor 1053/BL 02/G3/2021 Tanggal 6 Agustus, Perihal Tim Pendamping Keluarga Memastikan pembentukan Tim Pendamping Keluarga di seluruh desa di kabupaten dan

Implementasi Tim Pendamping Keluarga di tingkat desa diharapkan dapat memperkuat struktur sosial, meningkatkan keterlibatan warga, dan mendorong inisiatif lokal menuju desa mandiri. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memiliki sejumlah tujuan strategis, antara lain menurunkan angka prevalensi stunting, meningkatkan kesiapan dalam kehidupan berkeluarga, memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi, memperbaiki pola pengasuhan anak, meningkatkan akses serta mutu layanan kesehatan, dan memperluas akses terhadap air minum serta sanitasi yang layak. Seluruh tujuan tersebut diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Negeri et al., 2021).

Tim Pendamping Keluarga memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu yang memerlukan perhatian lebih. Kehadiran tim ini membantu keluarga menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan lebih efektif, meningkatkan taraf hidup, serta mempererat keharmonisan dalam keluarga. Upaya pencegahan terhadap permasalahan sosial seperti gizi buruk, anak putus sekolah, dan ketimpangan akses layanan kesehatan menjadi salah satu manfaat penting dari program ini. Selain itu, keluarga yang mendapatkan pendampingan dari tim tersebut cenderung lebih siap menghadapi berbagai kesulitan, sehingga turut memperkuat ketahanan keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan (Admindinsosp3akb, 2025). Salah satu langkah dukungan pemerintah adalah menyelenggarakan kursus pelatihan atau seminar. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas para kader agar dapat membantu keluarga di wilayah mereka mencegah stunting melalui gaya hidup sehat dan gizi yang baik. Para kader diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi keluarga yang mereka bantu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kader TPK lebih siap dan dapat memberikan dukungan optimal bagi keluarga yang berisiko mengalami stunting.

Desa Jambangan merupakan salah satu desa di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang menjalankan Program Tim Pendamping Keluarga (TPK). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jambangan No 14 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari 12 orang yang terbagi menjadi 4 tim. Pelaksanaan Program Tim Pendamping keluarga di Desa Jambangan, berfokus pada pendampingan dan pemantauan sasaran keluarga yang terdiri dari calon pengantin, ibu hamil, pascapersalinan, dan balita (baduta).

Setiap bulan, tim pendamping keluarga melakukan kunjungan satu hari. Tim menghubungi sasaran terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan kunjungan. Pada kunjungan semisal sasarannya adalah calon pengantin, tim memastikan koordinasi administrasi pernikahan, pemberian vaksin TT, serta kesiapan mental calon pengantin. Tim juga memberikan saran terkait gizi dan kesehatan sebagai persiapan masa kehamilan. Dengan adanya program tim pendamping keluarga sasaran menyambut baik dan merasa terbantu dengan pendampingan ini. Berikut tabel data sasaran calon pengantin, ibu hamil, pascapersalinan, dan balita (baduta) yang sudah dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga Desa Jambangan dari tahun 2024 – 2025.

Tabel 1. Data sasaran calon pengantin, ibu hamil, pascapersalinan, dan balita (baduta) Tahun 2024-2025

No	Kategori Sasaran	2024	2025
1	Calon Pengantin	5	20
2	Ibu Hamil	16	19
3	Pasca persalinan	12	11
4	Baduta	36	44

Sumber : Sistem Informasi Data Keluarga BKKBN Desa Jambangan, 2025

Berdasarkan tabel 1 hasil pendataan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Jambangan tahun 2024–2025, Pada tahun 2024, jumlah sasaran calon pengantin sebanyak 5 orang, ibu hamil 16 orang, ibu pascapersalinan 12 orang, dan baduta 36 anak. Sementara itu, pada tahun 2025, jumlah sasaran mengalami peningkatan pada beberapa kategori. Calon pengantin meningkat menjadi 20 orang, ibu hamil bertambah menjadi 19 orang, sedangkan kategori ibu pascapersalinan mengalami sedikit penurunan menjadi 11 orang. Adapun kategori baduta juga mengalami peningkatan dari 36 menjadi 44 anak. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah sasaran pendampingan keluarga pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada kategori calon pengantin, ibu hamil, dan baduta. Kondisi ini menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendampingan keluarga, sekaligus menunjukkan perluasan cakupan serta optimalisasi pelaksanaan program TPK di Desa Jambangan.

Dalam pelaksanaan Program Tim Pendamping Keluarga di Desa Jambangan masih belum maksimal karena memiliki tantangan dalam penerapannya

yaitu keterbatasan dalam sumber daya manusia pada tim pendamping keluarga, khususnya terkait penggunaan aplikasi elsimil untuk pelaporan data atau aktivitas program karena ada beberapa kader tim pendamping keluarga yang kesulitan ketika pelaporan menggunakan aplikasi elsimil jadi untuk pelaporan hasil masih menggunakan manual. Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Menikah dan Siap Hamil) merupakan aplikasi screening pendampingan dan pencegahan bagi pasangan yang berencana menikah tingkat provinsi yang bertujuan untuk mengatasi stunting. Aplikasi ini menghubungkan pasangan yang berencana menikah dengan tenaga kesehatan, berfungsi sebagai alat screening untuk mengidentifikasi resiko, serta menyediakan sumber daya pendidikan tentang cara mempersiapkan diri untuk pernikahan dan kehamilan, terutama terkait faktor risiko stunting (Indriyanti et al., 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga Dalam Membangun Desa Mandiri Di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Peneliti akan fokus pada indikator implementasi kebijakan berdasarkan model Edward III. Teori Implementasi sebagaimana yang disampaikan oleh George Edward III ada empat indikator dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*) yaitu) menunjukkan bahwa suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan sukses jika terdapat komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dan kelompok sasaran, Sumber Daya (*resources*) yaitu setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya keuangan dan manusia yang memadai, Disposisi (*dispositions*) yaitu merupakan karakteristik yang erat terkait dengan pelaksana program. Integritas, dedikasi, dan demokrasi merupakan sifat-sifat penting dari pelaksana kebijakan. dan Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*) yaitu bahwa implementasi kebijakan bergantung pada organisasi birokrasi, aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri (Dewi & Agustina, 2018).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rezka Zahra Humairah dkk (2024) berjudul Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) Di Desa Sinjar Bulan Kecamatan Gumay Ulu Lahat Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan case study dan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program TPK telah berhasil dilaksanakan di masyarakat Sinjar Bulan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai langkah yang telah diambil, termasuk menjangkau populasi sasaran, menyediakan sumber daya edukasi,

memiliki proses rujukan pasien yang jelas, dan memiliki sistem penanganan kasus stunting. Namun, pelaksanaan program TPK mungkin terhambat oleh beberapa hal, seperti staf yang terkadang mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, politik keluarga di desa, kemampuan pelaporan yang kurang memadai, dan seringnya gangguan koneksi internet (Rezka Zahra Humaira et al., 2024).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Yoana Alexandra dan Rahmadani Yusran (2024) berjudul Evaluasi Implementasi Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Penurunan Stunting di Nagari Kandang Baru Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru Kabupaten Sijunjung Melalui berbagai strategi, seperti edukasi/komunikasi, informasi, dan pelatihan (KIE), layanan rujukan dan fasilitas untuk mengakses program bantuan sosial, serta pendokumentasian dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga berisiko stunting, Namun, karena beberapa kendala dalam pelaksanaannya, fungsi TPK dalam menurunkan stunting belum optimal. Permasalahan ini mencakup, misalnya, kurangnya dana TPK yang berkelanjutan, pelaksanaan kampanye penyadaran atau informasi dan komunikasi yang kurang optimal, serta tantangan yang mereka hadapi dalam merawat anak-anak dengan stunting karena mereka masih belum mampu meyakinkan keluarga. Berdasarkan temuan studi, angka stunting di Nagari Kandang Baru masih belum sepenuhnya diturunkan oleh TPK (Alexandra & Yusran, 2024).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Lina Raswati dan rekan-rekannya (2023) berjudul Peran Tim Pendamping Keluarga sebagai Modal Sosial Dalam Pencegahan Stunting Studi Kasus di Desa Aikprapa Kecamatan Aikemel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa TPK memiliki lima peran utama dalam upaya pencegahan stunting, yaitu (1) sebagai pusat informasi, (2) pendamping masyarakat, (3) pemberi dukungan sosial, (4) wadah kerja sama, dan (5) unit produksi. Adapun hambatan yang dihadapi TPK di Desa Aikprapa meliputi (1) keterbatasan dana, (2) masih maraknya pernikahan usia anak, (3) kondisi kesehatan ibu yang kurang baik sejak awal, serta (4) nilai dan norma sosial masyarakat yang berpengaruh (Raswati et al., 2023)

Kempat, Penelitian yang dilakukan oleh Indira Sari dan Isna Fitria Agustina yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Mengurangi Stunting di Desa Kedung Solo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa keberhasilan program bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, yang didukung oleh penyediaan fasilitas dan pendanaan yang memadai dari pemerintah desa. Kedua, kelompok ini dibentuk untuk memungkinkan masyarakat menyuarakan pendapat dan membuat pilihan. Ketiga, peran dan tindakan kader Posyandu juga berperan penting, termasuk mendampingi keluarga melalui kunjungan rumah. Keempat, edukasi dan informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader Posyandu berperan penting dalam memperkuat pemahaman dan motivasi masyarakat untuk pengasuhan anak yang baik dan partisipasi aktif. Terakhir, kesadaran dan motivasi orang tua, khususnya dalam kegiatan Posyandu, sangat penting bagi keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting di Kedung Solo (Dyas & Agustina, 2023).

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara komprehensif menganalisis implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) menggunakan model implementasi kebijakan Edward III dalam konteks pembangunan desa mandiri. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek efektivitas penurunan stunting, tanpa mengkaji secara mendalam interaksi antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam mendukung kemandirian desa. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis implementasi TPK di Desa Jambangan secara sistematis berdasarkan model Edward III, sekaligus memberikan kontribusi empiris pada penguatan literatur implementasi kebijakan di tingkat desa.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk membangun desa mandiri di Jambangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana program, dan struktur birokrasi.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini terletak di Pemerintah

Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga Dalam Membangun Desa Mandiri di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen dan arsip yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*, yakni mereka yang memiliki pemahaman mendalam terhadap isu penelitian. Informan penelitian terdiri atas (1) Kaur Perencanaan sebagai Koordinator Program Tim Pendamping Keluarga; (2) Anggota Tim Pendamping Keluarga sebagai Pelaksana Program Tim Pendamping Keluarga dan (3) Masyarakat sebagai Penerima Program Tim Pendamping Keluarga. Teknis analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015), yang mencakup empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tahap pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi atau fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi penting agar mewakili keseluruhan temuan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi teks, serta dilengkapi dengan bagan, deskripsi, atau flowchart untuk memperjelas hasil temuan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah seluruh data disajikan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102), Implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, maupun kelompok, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi dipahami sebagai upaya nyata yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan sebagaimana tercantum dalam keputusan resmi. Dalam prosesnya, lembaga atau badan yang menjalankan kebijakan tersebut melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang pada akhirnya memberikan pengaruh atau dampak kepada masyarakat (Kaendung Evander, Pangemanan v, 2021). Berdasarkan hasil pengumpulan data dari observasi peneliti, wawancara,

survei literatur, dan sumber-sumber lainnya, peneliti telah melakukan penelitian dengan judul " Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Studi Kasus : Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ". Penelitian tersebut menggunakan teori George C Edward III yang terdiri dari 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumber, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berikut hasil dan pembahasan.

Komunikasi

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2017:136), komunikasi memiliki peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif apabila para pengambil keputusan memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawab mereka. Pemahaman ini hanya dapat terwujud melalui komunikasi yang baik, sehingga setiap pihak yang terlibat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Apabila komunikasi berjalan dengan lancar, maka seluruh keputusan dan peraturan pelaksanaan kebijakan dapat disampaikan secara tepat kepada instansi atau pihak yang berwenang. Selain itu, informasi yang dikomunikasikan perlu disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten agar para pelaksana kebijakan dapat bekerja selaras dan searah dalam mengimplementasikan kebijakan di masyarakat (Dinarwati & Natika, 2024). Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pernyataan dari Ibu Iis Hariati selaku Kaur Perencanaan Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

“Untuk Sosialisasi tpk di desa tidak ada karena tpk dibentuk secara langsung oleh plkb tetapi untuk bimbingan teknis ada di kecamatan terkait program tpk ini jadi pengenalan bagaimana warga tahu bahwa program tpk ini ada ya pada saat kunjungan pertama ini tiap kader tpk kan mau mengunjungi katakanlah baduta tadi akan menghubungi ibunya baduta bahwa ini akan ada pendampingan dari tim tpk untuk badutan tahunya dari situ yang pertama kunjungan ini tim tpk memperkenalkan diri apa sih tpk itu manfaatnya apa dan ini sampai berapa lama mereka akan melakukan pendampingan dan lain sebagainya seperti itu jadi otodidak langsung” (Wawancara 25 September 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sosialisasi program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan tidak dilakukan secara formal di tingkat desa. Pembentukan TPK dilakukan langsung oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tanpa adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi kader TPK tetap dilakukan di tingkat kecamatan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pelaksanaan program. Masyarakat desa pada umumnya baru mengetahui adanya program TPK ketika kader melakukan kunjungan pertama ke rumah sasaran, seperti keluarga dengan baduta (bayi di bawah dua tahun). Pada saat kunjungan

tersebut, kader TPK memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan tujuan, manfaat, serta bentuk pendampingan yang akan dilakukan. Dengan demikian, proses pengenalan program dilakukan secara langsung dan mandiri (otodidak) melalui pendekatan interpersonal saat kunjungan rumah.

Lalu, Ibu Khusnul Khotimah selaku Anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Jambangan.

“Iyaa ada sosialisasi dengan kunjungan ke rumah masyarakat dengan cara memperkenalkan diri Assalamualaikum permisi bapak ibu perkenalkan saya kader TPK desa jambangan tujuan saya ke sini untuk pendampingan keluarga yang punya balita, bumil, busui, catin dan remaja ” (Wawancara 10 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Jambangan melaksanakan sosialisasi program melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah warga dengan cara memperkenalkan diri secara sopan dan menjelaskan tujuan kedatangan, yaitu memberikan pendampingan kepada keluarga yang memiliki balita, ibu hamil, ibu menyusui, calon pengantin, dan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan program dilakukan secara langsung dan interpersonal agar informasi tersampaikan dengan jelas, membangun kedekatan dengan masyarakat, serta memastikan sasaran program memahami dan menerima kegiatan pendampingan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan menunjukkan bahwa aspek transmisi informasi dilakukan secara langsung kepada kelompok sasaran melalui kunjungan rumah. Tidak terdapat sosialisasi formal di tingkat desa, namun informasi mengenai program disampaikan oleh kader pada saat kunjungan pertama dengan memperkenalkan diri serta menjelaskan tujuan, manfaat, sasaran, dan jangka waktu pendampingan. Aspek kejelasan (*clarity*) tercermin dari penyampaian maksud dan tujuan program secara langsung kepada keluarga yang memiliki balita, ibu hamil, ibu menyusui, calon pengantin, dan remaja sehingga masyarakat memahami maksud dan bentuk kegiatan pendampingan. Sementara itu, aspek konsistensi (*consistency*) terlihat dari pola penyampaian yang sama oleh kader saat melakukan kunjungan, yaitu diawali dengan pengenalan dan penjelasan terkait program pendampingan. Dengan demikian, komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan program TPK di Desa Jambangan berlangsung melalui pendekatan interpersonal yang memuat unsur transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Makrifatul Azizah (2025) yang berjudul *“Peran Tim Pendamping Keluarga dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal Guna Pencegahan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Wonokusumo”* menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga. Hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif mencakup sikap terbuka, empati dan dialog berperan besar dalam membantu masyarakat memahami dan menerima informasi kesehatan, serta mendorong perubahan perilaku pencegahan stunting (Azizah, 2025). Serta Penelitian yang dilakukan oleh Lieskusumastuti, dkk (2022) yang berjudul *“Upaya Pencegahan Stunting melalui Metode Kunjungan Rumah”* menunjukkan bahwa pendampingan keluarga melalui metode kunjungan rumah berhasil memberikan edukasi, informasi, dan motivasi pada keluarga sasaran (termasuk ibu hamil dan balita) dengan penerimaan yang baik dari masyarakat. Dengan kunjungan langsung, keluarga merasa termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku baik terkait pencegahan stunting (Lieskusumastuti et al., 2022)

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya ini mencakup pegawai dengan keterampilan dan kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain pegawai, informasi, dan wewenang pembuat kebijakan, terdapat pula permasalahan fasilitas dalam lembaga yang dapat memengaruhi atau bahkan menghambat implementasi kebijakan (Indriyanti et al., 2024). Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pernyataan dari Ibu Iis Hariati selaku Kaur Perencanaan Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

“Untuk mendukung implementasi program TPK dan ini paket data paket data karena ini laporannya via server yang menggunakan internet paket data jadi ada paket datanya itu 100.000 per orang tiap bulan, batras juga ada untuk setiap kali kunjungan itu 50.000 ribu ya kemudian ATK tadi ya kayak segala macam penggandaan cetak fotocopy dan buku register itu dapat berapa gitu 50.000 ribu per tim ada 4 tim terus hambatannya itu laporan yang sering berubah-ubah kadang itu sekarang ini dibutuhkan laporan secara manual besok itu laporan secara link lah link-nya ini yang kita itu gampang-gampang sulit kadang jaringannya dari misalnya kita sudah melaporkan eh ternyata di sana enggak ke input kita melaporkan ulang manual jadi double gitu loh.” (Wawancara 25 September 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan terkait implementasi program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan TPK telah mendapatkan dukungan sumber daya yang cukup

memadai, terutama dalam bentuk dukungan finansial dan sarana operasional. Setiap anggota TPK memperoleh paket data sebesar Rp 100.000 per orang per bulan untuk menunjang kegiatan pelaporan yang dilakukan melalui server berbasis internet. Selain itu, terdapat pula insentif bantuan transportasi (bantras) sebesar Rp50.000 setiap kali melakukan kunjungan keluarga, serta dana alat tulis kantor (ATK) seperti penggandaan dokumen, fotokopi, dan buku register sebesar Rp50.000 per tim, di mana dalam satu desa terdapat empat tim TPK. Namun, meskipun dukungan sumber daya sudah disediakan, pelaksana di lapangan masih menghadapi beberapa hambatan, terutama terkait kendala teknis pada sistem pelaporan. Informan menyampaikan bahwa sistem pelaporan sering mengalami perubahan; terkadang pelaporan dilakukan secara manual, namun pada waktu lain harus melalui tautan (*link*) online. Kondisi ini menyebabkan proses pelaporan menjadi kurang efisien. Selain itu, sering kali terjadi gangguan jaringan internet yang mengakibatkan laporan yang sudah dikirim tidak terinput di server, sehingga anggota TPK harus tersebut menyebabkan terjadinya pekerjaan ganda (mengulang pelaporan secara manual. Situasi (*double report*) dan menambah beban kerja petugas.

Lalu, Ibu Khusnul Khotimah selaku anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Jambangan.

“ Sarana Prasarana yang digunakan biasanya HP untuk meinput hasil kunjungan ke aplikasi Elsimil dan Fasilitas yang di dapat kader TPK ada pulsa Rp 100.000 perbulan dan honor Rp. 120.000 bulan serta Pelatihan pendampingan oleh PLKB dan BKKBN biasanya semua tim tpk ngumpul di baldes terus di hadiri PLKB kecamatan ” (Wawancara 10 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan telah didukung oleh sarana prasarana, dukungan finansial, serta peningkatan kapasitas kader. Dalam pelaksanaannya, kader TPK menggunakan handphone (HP) sebagai alat utama untuk menginput hasil kunjungan ke dalam aplikasi Elsimil, sehingga proses pelaporan dan pendataan sasaran dilakukan secara digital dan terintegrasi. Selain itu, kader TPK memperoleh fasilitas berupa pulsa sebesar Rp100.000 per bulan dan honorarium sebesar Rp120.000 per bulan sebagai bentuk dukungan operasional dalam menjalankan tugas pendampingan kepada keluarga sasaran. Meskipun jumlahnya terbatas, fasilitas tersebut menunjukkan adanya dukungan sumber daya finansial untuk menunjang keberlangsungan kegiatan di lapangan. Di

JURNAL MANAJEMEN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK VOL 8 NO 1, MARET 2026

sisi lain, kader juga mendapatkan pelatihan pendampingan yang difasilitasi oleh PLKB dan BKKBN. Kegiatan pelatihan biasanya dilaksanakan di balai desa dengan menghadirkan PLKB kecamatan serta seluruh tim TPK. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar kader memahami tugas, fungsi, serta teknis pelaksanaan pendampingan keluarga.

Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan dalam indikator sumber daya mencakup sumber daya finansial, fasilitas/teknologi, dan sumber daya manusia. Dari sisi finansial, setiap anggota TPK memperoleh paket data sebesar Rp100.000 per bulan untuk mendukung pelaporan berbasis internet, bantuan transportasi (bantras) sebesar Rp50.000 setiap kali kunjungan, dana ATK sebesar Rp50.000 per tim untuk kebutuhan penggandaan dokumen, fotokopi, dan buku register, serta honorarium sebesar Rp120.000 per bulan. Di Desa Jambangan terdapat empat tim TPK yang menerima dukungan tersebut. Dari sisi fasilitas dan teknologi, kader menggunakan handphone (HP) untuk menginput hasil kunjungan ke dalam aplikasi Elsimil yang terhubung melalui server internet. Pelaporan dilakukan secara daring, namun dalam pelaksanaannya terdapat perubahan mekanisme pelaporan yang terkadang dilakukan secara manual dan di waktu lain melalui tautan (*link*) online. Selain itu, terdapat kendala jaringan yang menyebabkan laporan yang telah dikirim tidak terinput sehingga dilakukan pelaporan ulang secara manual. Dari sisi sumber daya manusia, kader TPK memperoleh pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh PLKB dan BKKBN. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di balai desa dengan menghadirkan PLKB kecamatan serta seluruh tim TPK. Pelatihan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan teknis pendampingan keluarga dalam program TPK di Desa Jambangan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Humaira,dkk (2024) yang berjudul “Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Sinjar Bulan Kecamatan Gumay Ulu Lahat Sumatera Selatan” menunjukkan bahwa pelaksanaan program TPK telah berjalan cukup baik berkat dukungan sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, dana operasional, aplikasi pelaporan, serta pelatihan kader. Setiap anggota TPK memperoleh insentif pulsa sebesar Rp100.000 dan dana operasional Rp110.000 per bulan untuk mendukung kegiatan pendampingan dan pelaporan melalui aplikasi elsimil. Namun, penelitian juga menemukan kendala berupa *error* sistem dan gangguan jaringan internet yang menyebabkan laporan tidak masuk ke server, sehingga kader harus mengulang pelaporan secara manual. Selain itu,

keterbatasan sarana prasarana seperti kurangnya laptop, printer, dan kualitas jaringan yang buruk turut menghambat efektivitas pelaporan. Meskipun demikian, dukungan finansial dan sumber daya manusia dianggap sudah cukup, hanya saja infrastruktur pelaporan dan jaringan internet perlu diperkuat agar pelaksanaan program lebih optimal (Rezka Zahra Humaira et al., 2024).

Disposisi

Disposisi merupakan salah satu unsur penting dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang merujuk pada sikap, kecenderungan, serta tanggapan para pelaksana terhadap suatu program kebijakan. Menurut Agus Anggara (2014), disposisi berkaitan dengan kesediaan dan komitmen implementor dalam melaksanakan kebijakan publik. Aspek disposisi meliputi tiga komponen utama, yaitu respons pelaksana terhadap kebijakan, tingkat pemahaman (kognisi) terhadap kebijakan tersebut, serta intensitas atau kesungguhan sikap implementor dalam menjalankannya (Wijaya et al., 2025). Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pernyataan dari Ibu Iis Hariati selaku Kaur Perencanaan Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

“Antusias, welcome, pada saat pendampingan sopan, karena memang ibu-ibu terbiasa kan menghadapi itu, lebih luwes terus tanggung jawab pokoknya aman-aman aja di sini cuma memang ada satu orang kemarin itu yang keterbatasan karena habis sakit itu jadi menghambat Otomatis dia tetangguh jawabnya sasarannya itu dilimpahkan ke teman yang lain nambah itu kendalanya.” (Wawancara 25 September 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa para kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan menunjukkan sikap dan disposisi yang positif dalam melaksanakan program pendampingan keluarga. Informan menyebutkan bahwa para kader bersikap antusias, ramah, sopan, dan luwes dalam berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini didukung oleh latar belakang mereka sebagai ibu rumah tangga yang terbiasa menghadapi berbagai situasi sosial di lingkungan desa. Sikap tersebut menciptakan suasana yang nyaman bagi keluarga sasaran saat menerima kunjungan pendampingan. Selain itu, kader TPK juga dikenal bertanggung jawab dan bekerja sama dengan baik. Meskipun terdapat salah satu anggota yang mengalami kendala kesehatan, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan karena tugas dan sasaran pendampingan dialihkan kepada kader lain.

Lalu, Ibu Khusnul Khotimah selaku anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Jambangan.

“Jadi sikap kita ketika melakukan pendamping setiap anggota bertanggung jawab dalam melaksanakan pendampingan dan selalu berkordinasi dengan Tim lain serta PLKB ” (Wawancara 10 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan, setiap anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing sesuai dengan peran yang telah ditetapkan. Tanggung jawab tersebut mencakup pelaksanaan kunjungan, pemberian edukasi, pemantauan kondisi sasaran, serta pelaporan hasil kegiatan. Selain itu, pernyataan tersebut juga menunjukkan adanya sikap kerja sama dan koordinasi yang baik antaranggota tim maupun dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Koordinasi ini penting untuk menyamakan informasi, membahas kendala di lapangan, serta memastikan bahwa pendampingan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan program.

Pelaksanaan Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan menunjukkan adanya sikap dan komitmen pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan. Indikator disposisi dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III menekankan pada sikap, komitmen, tanggung jawab, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para kader TPK bersikap antusias, ramah, sopan, dan luwes dalam berinteraksi dengan masyarakat saat melakukan pendampingan. Kader juga tetap melaksanakan kegiatan meskipun terdapat anggota yang mengalami kendala kesehatan, dengan cara mengalihkan tugas dan sasaran pendampingan kepada anggota lain. Selain itu, setiap anggota melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan serta melakukan koordinasi dengan anggota tim lain dan PLKB dalam pelaksanaan pendampingan. Berdasarkan indikator disposisi, pelaksanaan Program TPK di Desa Jambangan ditunjukkan melalui sikap pelaksana yang bertanggung jawab, adanya komitmen dalam menjalankan tugas, serta koordinasi antaranggota tim dalam mendukung pelaksanaan program.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Magfira dan Niluh Desy Purnamasari (2021) yang berjudul “Peran Kader Dalam Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu di Desa Makmur Kecamatan Palolo” menunjukkan bahwa sebagian besar kader melaksanakan perannya dengan baik karena memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat. Kader yang berkomitmen dan memiliki sikap positif mampu bekerja sama dengan tim lainnya

serta tetap menjalankan tugas meskipun menghadapi keterbatasan di lapangan. Hasil ini relevan dengan kondisi di Desa Jambangan, di mana kader tetap menjaga keberlangsungan program meskipun salah satu anggotanya mengalami kendala kesehatan (Magfira & Purnamasari, 2021)..

Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III (dalam Agustino, 2014:141), struktur organisasi terdiri dari pengembangan prosedur operasional standar (SOP) yang lebih adaptif, yang dapat meningkatkan kinerja organisasi atau administrasi. SOP adalah prosedur atau aktivitas rutin yang direncanakan, yang memungkinkan pelaksanaannya, seperti karyawan, pegawai negeri, dan staf administrasi, untuk mendistribusikan tanggung jawab atas berbagai aktivitas, tugas, atau program di antara unit kerja yang berbeda, masing-masing sesuai dengan bidang keahliannya. SOP juga memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas harian mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Jambangan No 11 Tahun 2025 pada dasarnya memuat ketetapan resmi dari pemerintah desa mengenai pembentukan, penetapan susunan keanggotaan, serta tugas dan fungsi Tim Pendamping Keluarga dalam mendukung pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Dalam isi keputusan, ditetapkan secara resmi nama-nama anggota Tim Pendamping Keluarga beserta unsur yang terlibat yaitu terdiri dari satu bidan desa dan 11 Kader PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa). Surat Keputusan tersebut juga mengatur kedudukan tim sebagai pelaksana pendampingan di tingkat desa yang bertugas melakukan identifikasi, pendampingan, edukasi, serta pelaporan terhadap keluarga sasaran, seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan keluarga dengan baduta/balita berisiko stunting. Dengan adanya penetapan ini, tim memiliki legitimasi administratif dalam menjalankan tugasnya.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pernyataan dari Ibu lis Hariati selaku Kaur Perencanaan Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

“Jadi, tim TPK itu dibagi sesuai wilayah yang terdiri dari bidan, pkk dan kader kb satu tim itu kan tiga orang Tim satu di Dusun Pesantren, Tim dua di Dusun Sidomulyo, Tim tiga RW 6 Perum Citra Sentosa Mandiri (CSM), dan Tim empat itu gabungan RW 7 dan 8 Perumtas 4 sama Perumtas Regency satu orang itu bertanggung jawab melaporkan setidaknya maksimal 12 sasaran satu orang berarti satu tim itu setidaknya 36 untuk wilayah tersebut tapi kalau memang

seandainya mentok nggak ada 36 nggak apa-apa sasarannya misalnya dalam satu wilayah, dusun pesantren masih andaikan 30, ya dibagi rata jadi perorang 10 sasaran, masing-masing orang dibagi rata, sesuai wilayah dampingannya, gitu jadi, tidak ada yang seperti ketua” (Wawancara 25 September 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan dibagi berdasarkan wilayah kerja agar kegiatan pendampingan dapat berjalan lebih efektif. Terdiri dari bidan, anggota PKK, dan kader KB dan setiap tim terdiri dari tiga orang. Pembagian wilayah dilakukan secara merata dengan yaitu Tim satu bertugas di Dusun Pesantren, Tim dua di Dusun Sidomulyo, Tim tiga di RW 6 Perum Citra Sentosa Mandiri (CSM), dan Tim empat di wilayah gabungan RW 7 dan 8 Perumtas 4 serta Perumtas Regency. Masing-masing anggota tim memiliki tanggung jawab untuk mendampingi maksimal 12 sasaran keluarga, sehingga satu tim menangani sekitar 36 sasaran. Apabila jumlah sasaran di suatu wilayah tidak mencapai 36, maka jumlah sasaran yang ada dibagi secara merata kepada masing-masing anggota tim. Sebagai contoh, apabila terdapat 30 sasaran dalam satu wilayah, maka setiap anggota bertanggung jawab atas 10 sasaran sesuai dengan wilayah dampingannya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, tidak terdapat struktur ketua dalam tim, sehingga ketiga anggota memiliki kedudukan yang setara.

Lalu, Ibu Khusnul Khotimah selaku anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Jambangan.

“Untuk pembagian tugasnya jumlah tim pendamping keluarga di sini ada 12 yang setiap tim terdiri dari 3 orang yang membawai paling sedikit 6 RT sesuai wilayah dampingan masing - masing di desa jambangan ada 4 tim pendamping tpk” (Wawancara 10 Oktober 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut, jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan sebanyak 12 orang. Seluruh anggota tersebut dibagi ke dalam 4 tim, di mana setiap tim terdiri dari 3 orang. Masing-masing tim bertanggung jawab mendampingi paling sedikit 6 RT sesuai dengan wilayah dampingan yang telah ditentukan di Desa Jambangan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, apabila dikaitkan dengan indikator struktur birokrasi dalam Teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III, pelaksanaan Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Jambangan menunjukkan adanya pembagian struktur kerja yang tersusun berdasarkan wilayah dan jumlah personel. Struktur tersebut terdiri atas 12 anggota yang terbagi ke dalam 4 tim, dengan masing-masing tim beranggotakan 3 orang yang terdiri dari bidan, anggota PKK, dan kader KB. Setiap tim memiliki wilayah dampingan yang berbeda, yaitu Dusun Pesantren, Dusun Sidomulyo, RW 6 Perum Citra Sentosa Mandiri (CSM), serta gabungan RW 7 dan 8 Perumtas 4 dan Perumtas Regency.

Masing-masing tim mendampingi paling sedikit 6 RT sesuai wilayah yang telah ditentukan. Dalam pembagian sasaran, setiap anggota bertanggung jawab atas maksimal 12 keluarga, sehingga satu tim dapat menangani sekitar 36 sasaran. Apabila jumlah sasaran tidak mencapai 36, maka dilakukan pembagian secara merata kepada masing-masing anggota. Dalam struktur tim tidak terdapat posisi ketua, sehingga ketiga anggota memiliki kedudukan yang setara dalam pelaksanaan tugas.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Evaluasi Program Tim Pendamping Keluarga Di Desa Lokus Stunting Kabupaten Konawe Selatan” yang dilakukan oleh Martina dan Devi Savitri Effendy (2025) menunjukkan bahwa Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan program strategis nasional dalam percepatan penurunan stunting yang melibatkan bidan, kader PKK, dan kader KB dan berfokus pada pendampingan kelompok sasaran dengan pembagian tugas kepada tiga unsur tersebut. Ini mendukung struktur tim yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB serta memberi kerangka tugas kerja sesuai keahlian masing-masing anggota tim (Martina & Effendy, 2025). Serta Penelitian sebelumnya yang berjudul “Peningkatan Kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Melakukan Surveilans pada Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sragen” yang dilakukan oleh Indri Mulyasari, dkk (2024) menunjukkan bahwa salah satu tugas TPK adalah mengumpulkan data keluarga dan melakukan surveilans gizi, yang menunjukkan adanya pembagian tugas masing-masing anggota dalam tim untuk bekerja dengan wilayah/keluarga tertentu. Hal ini mendukung tentang pembagian wilayah pendampingan (Mulyasari et al., 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan melalui empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada Indikator Komunikasi, penyampaian informasi program dilakukan secara langsung kepada sasaran melalui kunjungan

rumah. Tidak terdapat sosialisasi formal di tingkat desa, namun kader memperkenalkan diri serta menjelaskan tujuan, manfaat, sasaran, dan jangka waktu pendampingan pada kunjungan pertama. Proses komunikasi berlangsung secara interpersonal, dengan pola penyampaian yang sama pada setiap kunjungan sehingga informasi dapat diterima secara jelas oleh keluarga sasaran. Pada Indikator Sumber Daya, pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya finansial, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Kader memperoleh paket data, honorarium, bantuan transportasi, serta dana operasional untuk mendukung kegiatan pendampingan. Dalam pelaporan kegiatan, kader menggunakan handphone dan aplikasi Elsimil yang terhubung melalui jaringan internet. Selain itu, kader juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari PLKB dan BKKBN untuk menunjang pemahaman tugas dan fungsi mereka. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis pada sistem pelaporan dan jaringan internet. Pada Indikator Disposisi, para kader menunjukkan sikap antusias, ramah, sopan, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pendampingan. Setiap anggota menjalankan perannya sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan serta melakukan koordinasi dengan anggota tim lain dan PLKB. Apabila terdapat anggota yang berhalangan, tugas pendampingan dialihkan kepada anggota lain sehingga kegiatan tetap berjalan. Pada Indikator Struktur Birokrasi, pelaksanaan program didukung oleh adanya Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pendamping Keluarga. Struktur organisasi terdiri dari 12 anggota yang terbagi ke dalam 4 tim, masing-masing beranggotakan 3 orang dan dibagi berdasarkan wilayah dampingan. Setiap anggota bertanggung jawab atas sejumlah keluarga sasaran sesuai wilayah yang telah ditentukan. Dalam struktur tersebut tidak terdapat posisi ketua, sehingga seluruh anggota memiliki kedudukan yang setara dalam pelaksanaan tugas pendampingan.

Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) tidak hanya dari perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, tetapi juga menggunakan pendekatan teori lain seperti model Van Meter dan Van Horn atau model evaluasi kebijakan, sehingga diperoleh perbandingan analisis yang lebih komprehensif terkait faktor keberhasilan dan hambatan program.
2. Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan lokasi penelitian dengan melakukan studi komparatif antara beberapa desa dalam satu kecamatan atau kabupaten, sehingga dapat diketahui perbedaan pola implementasi,

strategi pendampingan, serta efektivitas program dalam konteks wilayah yang berbeda.

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam terkait efektivitas penggunaan aplikasi Elsimil dalam mendukung kinerja Tim Pendamping Keluarga, khususnya dari aspek kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur jaringan, serta dampaknya terhadap akurasi dan efisiensi pelaporan program.
4. Penelitian mendatang dapat menambahkan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk mengukur secara lebih terstruktur dampak Program TPK terhadap penurunan risiko stunting, peningkatan pengetahuan keluarga, maupun perubahan perilaku kesehatan masyarakat.
5. Peneliti selanjutnya juga dapat menggali lebih dalam mengenai tingkat partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan Tim Pendamping Keluarga, sehingga diperoleh gambaran mengenai penerimaan sosial program serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan program dalam mewujudkan desa mandiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Admindinsosp. (2025). *Peningkatan Kapasitas Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Penanganan Keluarga Berisiko Stunting*. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten. <https://dissosp3appkb.klaten.go.id/peningkatan-kapasitas-kader-tim-pendamping-keluarga-tpk-dalam-penanganan-keluarga-berisiko-stunting>
- Alexandra, Y., & Yusran, R. (2024). Evaluasi Implementasi Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Penurunan Stunting di Nagari Kandang Baru Kabupaten Sijunjung. *Journal of Governance and Local Politics*, 6(2), 283–292.
- Azizah, A. M. (2025). Peran Tim Pendamping Keluarga dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal Guna Pencegahan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Wonokusumo. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(1), 2164–2177. <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i1.42304>
- Dewi, Y. C., & Agustina, I. F. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 6(2), 129–135. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3007>
- Dyas, E. W., & Agustina, I. F. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan di Desa Sugihwaras. *PubliKA Jurnal Ilmu Administrasi ...*, 1, 1–12. <https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/2862>
- Indriyanti, M., Azkia, M., Eko Ginanjar, S., Santa, R., & Maryulina, T. (2024). Inovasi Pencegahan Stunting Dalam Menggunakan Aplikasi Elsimil. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 6(1), 137–142. <https://doi.org/10.36917/japabis.v6i1.142>

- Kaendung Evander, Pangemanan v, U. G. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat*, 1(2), 1–11.
- Lieskusumastuti, A. D., Jannah, R., & Nurgianti, R. A. N. (2022). Upaya Pencegahan Stunting melalui Metode Kunjungan Rumah. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 4(Juni), 283–292.
- Magfira, & Purnamasar, N. D. (2021). Peran Kader Dalam Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu Di Desa Makmur Kecamatan Palolo . *Jurnal Ilmiah Kesmas IJ (Indonesia Jaya)*, 36-42.
- Martina, M., & Effendy, D. S. (2025). Evaluasi Program Tim Pendamping Keluarga Di Desa Lokus Stunting Kabupaten Konawe Selatan. *JUKEJ: Jurnal Kesehatan Jompa*, 4(2), 824–830. <https://doi.org/10.57218/jkj.vol4.iss2.1921>
- Mulyasari, I., Puji Afiatna, Moneca Diah Listiyaningsih, & Anisa Puspitasari. (2024). Peningkatan Kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Melakukan Surveilans pada Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sragen. *Indonesian Journal of Community Empowerment (Ijce)*, 6(1), 112–117. <https://doi.org/10.35473/ijce.v6i1.3189>
- Negeri, T. K. D., Kesehatan, T. K., Desa, T. K., BKKBN, T., PKK, T. T., & Indonesia), T. I. (Ikatan B. (2021). *Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan*. Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. https://daikeren.id/uploads/daikeren-buku_panduan_tim_pendamping_final.pdf
- Rahman, A., Munawarah, & Fakhri. (2025). Implementasi Program TPK (Tim Pendamping Keluarga) dalam Pendampingan Calon Pengantin dan Ibu Hamil di Desa Telaga Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 735–747.
- Raswati, L., Siti Nurjannah, & Kusuma3, N. (2023). *Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) Sebagai Modal Dalam Pencegahan Stunting (Studi Kasus di Desa Aikprapa Kecamatan Aikmel)*. 179–186. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062>
- Rezka Zahra Humaira, Kartini, F., & Rosidah, L. (2024). *Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) Di Desa Sinjar Bulan Kecamatan Gumay Ulu Lahat Sumatera Selatan*. 15(1), 79–96. https://doi.org/10.1142/9789813226913_0011
- Suherman, M., & Rohaeni, N. (2023). Efektivitas Program Desa Mandiri dalam Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung). *Remik: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7(3), 1534–1542. <http://doi.org/10.33395/remik.v7i3.12846>
- Wijaya, M. I., Hertati, D., & Universitas Pembangunan Nasional „Veteran“. (2025). Implementation of the “Jemput Bola Administrasi Kependudukan” (JEBOL ANDUK) goes to School program as an effort to accelerate the issuance of identity cards for First-Time applicants. In *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik* (p. 109) [Journal-article]. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP>